

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 31 Januari 2017

Kepala Perwakilan,

Iman Achmad Nugraha  
NIP 19590304 198101 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	
A. PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum	1
2. Entitas Pelaporan	2
3. Periode Laporan	3
B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	3
1. Kapitalisasi	3
2. Penyusutan Aset Tetap	4
C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	5
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	6
1. Saldo Awal	6
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	6
3. Barang Milik Negara Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016	17
E. INFORMASI BMN LAINNYA	20
1. Perkembangan Nilai BMN	20
2. Informasi Pengelolaan BMN	20
3. BMN dari Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	20
4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum	21
5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain	21
6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	21
7. BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	21
LAMPIRAN	
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA	
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA <i>INTRAKOMPTABEL</i>	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA <i>EKSTRAKOMPTABEL</i>	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN	
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD	
LAPORAN BARANG BERSEJARAH	
LAPORAN PENYUSUTAN	
LAPORAN BARANG HILANG	
LAPORAN BARANG RUSAK BERAT	
LAPORAN BPYBDS	
BERITA ACARA REKONSILIASI ( DJKN )	
BERITA ACARA REKONSILIASI ( KPKNL )	

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 Perubahan Ketiga atas PMK No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 125 /PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK/TP sebelum TA 2011;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK 1 /PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual ;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.06/2015 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pemerintah Pusat;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- s. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- t. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- u. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014.

## **2. Entitas pelaporan**

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit akuntansi dengan fungsi rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Periode Pelaporan**

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dan disajikan untuk periode tahunan TA 2016 (periode yang berakhir 31 Desember 2016).

## **B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

### **1. Kapitalisasi**

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Semester II Tahun 2016 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

## 2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Semester II Tahun Anggaran 2016 sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar:

- a. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- b. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah:

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

### C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Periode Semester II Tahun 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Nilai BMN gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) yang disajikan pada periode Semester II Tahun 2016 ini adalah sebesar Rp39.778.623.541,00 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Semester II Tahun 2016 sebesar Rp537.810.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (*Intrakomptabel*, *Ekstrakomptabel*, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK-SIMAK pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

## D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016

### 1. Saldo Awal

Nilai BMN per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp39.778.623.541,00 Jumlah ini terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp39.778.136.541,00 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp487.000,00.

### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

#### a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 sebesar Rp180.502.031,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp180.502.031,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp1.882.380,00 jumlah tersebut dapat dirinci:

Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)
117111	Barang Konsumsi	Rp162.321.016	Rp221.305.306	Rp58.984.290
117113	Barang untuk Pemeliharaan	Rp4.440.700	Rp5.648.500	Rp1.207.800
117114	Suku Cadang	Rp0	Rp0	Rp 0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp0	Rp0	Rp 0
117131	Bahan Baku	Rp0	Rp0	Rp 0
117199	Persediaan Lainnya	Rp13.740.315	Rp25.074.920	Rp11.334.605
<b>Jumlah</b>		<b>Rp180.502.031</b>	<b>Rp252.028.762</b>	<b>Rp71.526.695</b>

Tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak berat dan usang.

#### b. Tanah

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 Rp18.453.392.000,00 untuk 21.999 M<sup>2</sup>/ 14 persil. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal nilai sebesar Rp22.560.845.000,00 untuk 32.478 M<sup>2</sup> 17 persil dan terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini dengan nilai sebesar Rp4.107.453.000,00 untuk 10.479 M<sup>2</sup> 3 persil. Dari jumlah/nilai Tanah di atas.

Tidak terdapat tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Terdapat Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah (BMN *Idle*/SK Penghapusan Nomor 496/K.SU/05/2016 tanggal 23 Desember 2016).



Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

**c. Peralatan & Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 2.258 unit sebesar Rp5.695.122.551,00 Jumlah tersebut berasal dari saldo awal sebanyak 2.258 sebesar Rp5.695.122.551,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

**1) 3.01. Alat Bantu**

Saldo Alat Bantu berupa alat besar Genset dan Water Pump pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Alat Bantu (alat besar) yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	5 Unit	Rp360.886.502,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**2) 3.02. Alat Angkutan**

Saldo Alat Angkutan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp1.073.096.100,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp1.073.096.100,00.

Jumlah alat angkut kendaraan roda empat berupa minibus sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp963.920.000,00, sedan 1 unit dengan nilai sebesar Rp65.120.000,00 dan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp 44.056.100,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	12 Unit	Rp 1.035.144.100
Rusak Berat	2 Unit	Rp 28.880.000
Rusak Berat	2 Unit	Rp 9.072.000

Terdapat 2 unit kendaraan roda empat yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp28.880.000,00. dan 2 unit kendaraan roda dua yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp9.072.000,00.

Tidak ada kelompok Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

### 3) 3.03. Alat Bengkel & Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp550.000,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp550.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	1 Unit	Rp 550.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat		

Tidak ada kelompok Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

### 4) 3.04. Alat pertanian

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Pertanian.

### 5) 3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1.971 unit dengan

nilai sebesar Rp2.500.808.700,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.971 unit dengan nilai sebesar Rp2.500.808.700,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	1.971 Unit	Rp2.500.808.700,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### **6) 3.06. Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar**

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 64 unit dengan nilai sebesar Rp447.914.276,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 64 unit dengan nilai sebesar Rp447.914.276,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	64 unit	Rp 447.914.276,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### **7) 3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan**

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp2.164.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp2.164.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	4 unit	Rp 2.164.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### 8) 3.08. Alat Laboratorium

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Laboratorium.

#### 9) 3.09. Alat Persenjataan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Persenjataan.

#### 10) 3.10. Komputer

Saldo Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 194 dengan nilai sebesar Rp1.309.403.973,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 194 unit dengan nilai sebesar Rp1.309.403.973,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Rincian data Komputer Sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
P.C. Unit	84	595.249.850,00
Note Book Acer	27	268.770.990,00
Printer	59	142.820.450,00
Lap Top	1	6.085.000,00
Scanner	8	36.031.600,00
Local Area Network (LAN)	3	98.603.016,00
Peralatan Mini Komputer	5	5.087.500,00
CPU	2	4.817.000,00
External	1	660.000,00
Server	1	54.150.862,00
Router	1	53.222.059,00
Hub	2	43.905.646,00
Jumlah	194	1.309.403.973,00

Tidak terdapat Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	194 Unit	Rp1.309.403.973,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**11) 3.11. Alat Eksplorasi**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Eksplorasi.

**12) 3.12. Alat Pengeboran.**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Pengeboran.

**13) 3.13. Alat Produksi, Pengolahan, & Pemurnian**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

**14) 3.14. Alat Bantu Eksplorasi**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Bantu Eksplorasi.

**15) 3.15. Alat Keselamatan Kerja**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Keselamatan Kerja.

**16) 3.16. Alat Peraga**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Alat Peraga.

**17) 3.17. Peralatan Proses/Produksi**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Peralatan Proses/Produksi.

**18) 3.18. Rambu-rambu**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Rambu-rambu.

### 19) 3.19. Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016.

Tidak terdapat Peralatan Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 Unit	Rp 299.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

### 20) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.881.573.954,00, terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp4.689.714.919,00 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp487.000,00, serta mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp191.372.035,00.

#### d. Gedung & Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.370.300.990,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp15.099.201.990,00 dan terdapat mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp266.711.000,00 (terdapat penghapusan Nomor KEP-496/K.SU/05/2016 tanggal 23 Desember 2016 / BAST-2317/PW07/1/2016 tanggal 8 Desember 2016 sebanyak 4 unit rumah negara) dan mutasi tambah sebesar Rp537.810.00,00.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang:

#### 1) 4.01. Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 69 unit dengan nilai

Rp15.370.300.990,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 73 unit dengan nilai sebesar Rp15.099.201.990,00, mutasi tambah sebesar Rp537.810.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp266.711.000,00.

Rincian mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

<b>Uraian Jenis Transaksi</b>	<b>Intrakomptabel (Rp)</b>	<b>Ekstrakomptabel (Rp)</b>
Pengembangan Langsung	-	-
Bangunan Gedung Kantor	-	-
Rumah Negara Gol I tipe B Permanen	83.175.228,00	-
Rumah Negara Gol I tipe C Permanen	24.510.000,00	-
Rumah Negara Gol II tipe D Permanen	151.248.012,00	-
Rumah Negara Gol II tipe E Permanen	45.424.455,00	-
Rumah Negara Gol II tipe E semi Permanen	93.885.833,00	-
Rumah Negara Gol II tipe E Darurat	139.566.472,00	-
Jumlah	537.810.000,00	-

Terdapat Penghapusan Nomor KEP-496/K.SU/05/2016 tanggal 23 Desember 2016 dengan BAST-2317/PW07/1/2016 tanggal 8 Desember 2016 pada periode 31 Desember 2016 dengan nilai Rp266.711.000,00.

Tidak terdapat Bangunan Gedung yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	62 Unit	Rp15.161.201.264,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	11 Unit	Rp 209.099.726,00

Saldo Bangunan Gedung pada posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp15.370.300.990,00 terdapat rumah negara statusnya yang dihentikan dari penggunaannya sebanyak terdiri dari 11 unit lokasi di Komplek Seduduk Putih sebesar Rp209.099.726,00.

## 2) 4.02. Monumen

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Monumen.

## 3) 4.03. Bangunan Menara

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Bangunan Menara.

**4) 4.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti**

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 14 unit dengan nilai sebesar Rp334.944.000,00 (tanda batas administrasi kepemilikan).

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 31 Desember 2016 Tahun Anggaran 2016.

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/Pasti yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/Pasti berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	14 Unit	Rp334.944.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**5) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.922.806.133,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.845.841.469,00 mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp76.964.664,00.

**e. Jalan, Irigasi, dan jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp180.921.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp180.921.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

**1) 5.01. Jalan & jembatan**

Saldo Jalan dan Jembatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp173.421.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp173.421.000,00, dan tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya:



Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	9 Unit	Rp 173.421.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

## 2) 5.02. Bangunan Air

Saldo Bangunan Air pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp7.500.000,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp7.500.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Bangunan Air yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat prose penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bangunan Air berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 Unit	Rp 7.500.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Bangunan Air yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

## 3) 5.03. Instalasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Instalasi.

## 4) 5.04. Jaringan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Jaringan.

## 5) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp174.878.268,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp174.784.608,00 dan mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp93.669,00.

**f. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1.447 buah sebesar Rp78.400.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp78.400.000,00, tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

**1) 6.01. Bahan Perpustakaan**

Saldo Bahan Perpustakaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar Rp63.050.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar Rp63.050.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, tidak terdapat Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bahan Perpustakaan berdasarkan status kondisinya:

<b>Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	1.446 unit	Rp63.050.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**2) 6.02. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, tidak terdapat Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp15.350.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.350.000,00

**g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki KDP.

**h. Aset Lainnya**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki Aset lainnya.

**1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

**2) Aset Tak Berwujud**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki Aset Tak Berwujud.

**3) BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki saldo Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

**i. BMN Berupa Aset Bersejarah**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.

**3. BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016**

**a. BMN Per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp39.778.623.541,00 (diisi gabungan *ekstrakomptabel* dan

*intrakomptabel*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan,

Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian:

<b>Neraca</b>	<b>Intrakomptabel (Rp)</b>	<b>Ekstrakomptabel (Rp)</b>	<b>Gabungan (Rp)</b>
Aset Lancar			
Persediaan	252.028.726	0	252.028.726
<b>Sub Jumlah A</b>	<b>252.028.726</b>	<b>0</b>	<b>252.028.726</b>
Aset Tetap			
Tanah	18.453.392.000	0	18.453.392.000
Peralatan & Mesin	5.695.122.551	487.000	5.695.609.551
Gedung & Bangunan	15.370.300.990	0	15.370.300.990
Jalan dan Jembatan, Irigasi	180.921.000	0	180.921.000
Aset Tetap Lainnya	78.400.000	0	78.400.000
KDP	0	0	0
<b>Sub Jumlah B</b>	<b>39.778.136.541</b>	<b>487.000</b>	<b>39.778.623.541</b>
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Ops. Pemerintah	0	0	0
<b>Sub Jumlah C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>39.778.136.541</b>	<b>487.000</b>	<b>39.778.623.541</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 per Perkiraan Neraca:

<b>Neraca</b>	<b>Intrakomptabel (Rp)</b>	<b>Ekstrakomptabel (Rp)</b>	<b>Gabungan (Rp)</b>
Aset Tetap			
Peralatan & Mesin	4.881.573.954	487.000	4.882.060.954
Gedung & Bangunan	2.922.806.133	0	2.922.806.133
Jalan, Irigasi, & Jaringan	174.878.268	0	174.878.268
Aset Tetap Lainnya	15.350.000	0	15.350.000
KDP	0	0	0
<b>Sub Jumlah A</b>	<b>7.994.608.355</b>	<b>487.000</b>	<b>7.995.095.355</b>
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0

<b>Neraca</b>	<b>Intrakomptabel (Rp)</b>	<b>Ekstrakomptabel (Rp)</b>	<b>Gabungan (Rp)</b>
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
<b>Sub Jumlah B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>7.994.608.355</b>	<b>487.000</b>	<b>7.995.095.355</b>
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
<b>Sub Jumlah B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>7.994.608.355</b>	<b>487.000</b>	<b>7.995.095.355</b>

**b. Perbandingan Nilai BMN pada laporan Barang dan Laporan Keuangan**

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMAK-BMN) dan Laporan Keuangan (SAKPA) pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 per akun Neraca adalah:

<b>Neraca</b>	<b>Laporan Barang (Rp)</b>	<b>Laporan Keuangan (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
Persediaan	252.028.726	252.028.726	0
Tanah	18.453.392.000	18.453.392.000	0
Peralatan & Mesin	5.695.122.551	5.695.609.551	487.000
Gedung & Bangunan	15.370.300.990	15.370.300.990	0
Jalan, Irigasi, & Jaringan	180.921.000	180.921.000	0
Aset Tetap Lainnya	78.400.000	78.400.000	0
KDP	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain *)	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	<b>(7.994.608.355)</b>	<b>(7.994.608.355)</b>	0
<b>Total</b>	<b>32.035.556.912</b>	<b>32.036.043.912</b>	487.000

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan keuangan sebesar Rp487.000,00 terjadi pada barang *ekstrakomptabel* yang tidak tercatat di neraca SAKPA.

## E. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama lima periode terakhir, dapat disajikan:

Periode	Nilai BMN	Perkembangan	
		Rupiah	Persen
2012	Rp 40.795.559.283	(Rp 1.997.469.542)	-4,896%
2013	Rp 42.397.208.648	Rp 1.601.649.365	3,777 %
2014	Rp 42.389.229.222	Rp 180.580.000	0,426 %
2015	Rp 43.560.309.591	Rp 1.683.295.481	3,864 %
2016	RP 39.778.623.541	RP 537.810.000	1,352 %

### 2. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2016 yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp6.375.345.451,00 pada kolom 2 sedangkan yang masih dalam proses penetapan di BPKP Pusat, KPKNL dan DJKN Palembang sebesar Rp33.402.791.090,00 pada kolom 3 :

Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan/ Dalam Proses
I	2	3
Tanah	Rp0	Rp18.453.392.000
Peralatan & Mesin	Rp5.601.906.451	Rp93.216.100
Gedung & Bangunan	Rp656.814.000	Rp14.713.486.990
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp38.225.000	Rp142.696.000
Aset Tetap Lainnya	Rp78.400.000	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp6.375.345.451</b>	<b>Rp33.402.791.090</b>

#### b. Pengelolaan BMN Idle

Uraian	Jumlah *)
Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN idle	7 Unit
Ditetapkan sebagai BMN idle oleh Pengelola	7 Unit
Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh Pengelola	7 Unit
Telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna	7 Unit
Selesai serah terima kepada Pengelola	7 Unit

\*) Jumlah 7 unit merupakan 3 Persil tanah seluas 10.497 m2 dan 4 unit rumah Negara.

### 3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum.

**5. BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).

**6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

**a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak memiliki BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

**b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 memiliki BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

**7. BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2016 tidak mengelola BMN berupa BPYBDS.

**Informasi:** Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penghapusan BMN berupa tanah dan / atau bangunan pada Semester II tahun 2016 seluas tanah 10.479 m2 dengan nilai sebesar Rp4.107.453.000,00 dan rumah negara sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp266.711.000,00 sesuai SK. Penghapusan BMN *IDLE* No.KEP-496/K.SU/05/2016, tanggal 23 Desember 2016.